

Peran Sekolah Terbuka dalam Meningkatkan Kesetaraan dan Hak atas Pendidikan di Kota Depok

Suryamin^{1*}, Sri Rahayu Pudjiastuti², Suidat³

¹SMAN 5 Kota Depok, Indonesia

^{2,3}STKIP Arrahmaniyah, Indonesia

Abstrak—Sekolah Terbuka merupakan salah satu alternatif layanan pendidikan yang dirancang untuk memperluas akses belajar bagi peserta didik yang menghadapi keterbatasan sosial, ekonomi, maupun kondisi personal yang menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan formal reguler. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sekolah Terbuka dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan serta mengurangi disparitas hak dalam memperoleh pendidikan di Kota Depok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pengelola Sekolah Terbuka, guru pamong, peserta didik, serta pihak terkait dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka berperan penting dalam memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang berisiko putus sekolah, terutama dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi maupun peserta didik yang harus bekerja. Melalui sistem pembelajaran yang fleksibel, pendekatan pembelajaran yang adaptif, serta dukungan sekolah induk, Sekolah Terbuka mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan formal. Namun demikian, penelitian juga menemukan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan tenaga pendidik, serta masih adanya stigma masyarakat terhadap Sekolah Terbuka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dukungan kebijakan serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar peran Sekolah Terbuka dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci:

Disparitas hak pendidikan, kesetaraan pendidikan, Sekolah terbuka.

Histori:

Dikirim: 12 Januari 2026

Direvisi: 18 Maret 2026

Diterima: 26 Maret 2026

Online: 26 Maret 2026

©2026 JCV



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Suryamin, S., Pudjiastuti, S.R., & Suidat, S. (2026). Peran Sekolah Terbuka dalam Meningkatkan Kesetaraan dan Hak atas Pendidikan di Kota Depok. *Jurnal Citizenship Virtues*, 6(1), 100-110.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: abisuheilltea@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi. Hak atas pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga mencakup jaminan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun kondisi personal, dapat mengakses layanan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhannya. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan adaptif agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan (Tilaar, 2012; UNESCO, 2017).

Meskipun secara normatif hak atas pendidikan telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai kebijakan pendidikan nasional, dalam praktiknya pemenuhan hak pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi persoalan yang terjadi di berbagai wilayah, baik di daerah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Faktor sosial ekonomi, keterbatasan waktu belajar, tekanan sosial, serta struktur sistem pendidikan formal yang relatif seragam sering kali menjadi hambatan bagi sebagian kelompok masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan secara optimal (Suyanto & Hisyam, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga pendidikan, tetapi juga dengan kemampuan sistem pendidikan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki kondisi sosial yang beragam.

Kota Depok sebagai salah satu wilayah perkotaan penyangga DKI Jakarta memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks. Pertumbuhan penduduk yang pesat, arus urbanisasi, serta heterogenitas latar belakang sosial ekonomi masyarakat menciptakan tantangan tersendiri dalam penyediaan layanan pendidikan yang merata. Dalam konteks tersebut, masih terdapat kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan formal reguler, khususnya peserta didik dari keluarga kurang mampu, pekerja usia sekolah, maupun peserta didik yang memiliki keterbatasan waktu belajar akibat kondisi sosial tertentu (Suyanto & Hisyam, 2018).

Data Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Depok menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan masyarakat relatif tinggi, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Namun demikian, data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan partisipasi pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, khususnya pada tingkat pendidikan menengah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peserta didik yang tidak dapat melanjutkan pendidikan secara berkelanjutan, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Disparitas hak dalam memperoleh pendidikan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan waktu belajar, tuntutan pekerjaan, serta kurangnya fleksibilitas sistem pendidikan formal dalam menyesuaikan diri dengan kondisi peserta didik. Sistem pendidikan formal yang cenderung seragam sering kali tidak mampu menjangkau peserta didik yang memiliki kondisi sosial yang berbeda. Akibatnya, sebagian anak usia sekolah berisiko mengalami putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Coombs,

1985). Dalam konteks tersebut, diperlukan inovasi penyelenggaraan pendidikan yang mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang mengalami hambatan dalam mengikuti sistem pendidikan reguler. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penyelenggaraan Sekolah Terbuka sebagai alternatif layanan pendidikan formal yang lebih fleksibel dan inklusif. Sekolah Terbuka memungkinkan peserta didik untuk tetap mengikuti proses pendidikan melalui sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka, tanpa kehilangan hak atas pengakuan akademik yang setara dengan sekolah reguler (Kemendikbud, 2019).

Konsep Sekolah Terbuka sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman peserta didik dan penghapusan berbagai hambatan dalam proses pembelajaran. Pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada penyediaan akses pendidikan, tetapi juga pada penciptaan sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda-beda (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006). Dalam perspektif ini, Sekolah Terbuka dapat dipandang sebagai mekanisme pendidikan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik.

Dari perspektif keadilan sosial, penyediaan layanan pendidikan alternatif seperti Sekolah Terbuka juga dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi kurang beruntung. Rawls (1999), menyatakan bahwa keadilan sosial dapat terwujud apabila kebijakan dan institusi sosial memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan Sekolah Terbuka dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan akses pendidikan. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan peningkatan mobilitas sosial masyarakat. Coleman (1988), menegaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk modal sosial yang dapat meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Melalui perluasan akses pendidikan, lembaga pendidikan dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial serta memperkuat keadilan sosial di masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka memiliki kontribusi dalam memperluas akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah, khususnya bagi peserta didik yang mengalami hambatan sosial dan ekonomi. Fokus utama penelitian terdahulu umumnya menekankan efektivitas program Sekolah Terbuka dari aspek peningkatan angka partisipasi sekolah, fleksibilitas sistem pembelajaran, serta keberlanjutan pendidikan peserta didik (Coombs, 1985; Kemendikbud, 2019). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan Sekolah Terbuka terutama dalam perspektif kebijakan pendidikan dan peningkatan partisipasi sekolah. Kajian yang secara khusus menempatkan Sekolah Terbuka dalam kerangka hak atas pendidikan dan kesetaraan hak pendidikan masih relatif terbatas. Padahal, kesetaraan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan layanan pendidikan, tetapi juga dengan pemenuhan hak pendidikan secara adil dan inklusif bagi seluruh peserta didik (Tilaar, 2012; UNESCO, 2017).

Selain itu, penelitian mengenai Sekolah Terbuka masih didominasi oleh kajian berskala nasional atau wilayah pedesaan, sementara kajian yang secara khusus

meneliti implementasi Sekolah Terbuka di wilayah perkotaan dengan kompleksitas sosial yang tinggi masih relatif terbatas. Kota Depok sebagai wilayah perkotaan dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam memerlukan kajian kontekstual untuk memahami bagaimana Sekolah Terbuka berperan dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan di lingkungan perkotaan (Suyanto & Hisyam, 2018).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji peran Sekolah Terbuka dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan dan mengurangi disparitas hak dalam memperoleh pendidikan di Kota Depok dengan menggunakan pendekatan berbasis hak atas pendidikan. Penelitian ini tidak hanya melihat Sekolah Terbuka sebagai alternatif penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan secara adil dan setara bagi peserta didik yang mengalami keterbatasan akses.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian pendidikan inklusif dan pendidikan kewargaan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari keadilan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pemerataan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Sekolah Terbuka dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan dan mengurangi disparitas hak dalam memperoleh pendidikan di Kota Depok. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, pengalaman, serta praktik sosial yang terjadi dalam penyelenggaraan Sekolah Terbuka, sehingga memungkinkan peneliti menggali realitas empiris secara lebih komprehensif dalam konteks yang alami (Creswell, 2014). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi sekaligus menganalisisnya berdasarkan kerangka teori kesetaraan pendidikan dan hak atas pendidikan (Pudjiastuti, 2019; Sugiyono, 2019).

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa Sekolah Terbuka tingkat SMP yang berada di bawah naungan sekolah induk di Kota Depok. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi lokasi terhadap tujuan penelitian serta keberadaan program Sekolah Terbuka yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kota Depok dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang beragam, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas akses terhadap layanan pendidikan (Moleong, 2017).

Subjek penelitian ini terdiri atas berbagai pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Sekolah Terbuka, meliputi pengelola Sekolah Terbuka, guru pamong atau tutor, peserta didik, serta perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait fenomena yang diteliti (Patton, 2002). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini melibatkan informan utama yang merepresentasikan aspek kebijakan, pelaksanaan, serta pengalaman

langsung dalam proses pendidikan di Sekolah Terbuka. Pengelola sekolah berperan dalam memberikan informasi mengenai kebijakan dan manajemen program, guru pamong atau tutor menjelaskan proses pembelajaran dan pendampingan peserta didik, peserta didik menyampaikan pengalaman belajar secara langsung, sedangkan pihak dinas pendidikan memberikan perspektif kebijakan serta dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan program.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi informan mengenai peran Sekolah Terbuka dalam menjamin kesetaraan pendidikan dan pemenuhan hak atas pendidikan. Setiap wawancara dilaksanakan secara langsung dengan durasi berkisar antara 30 hingga 60 menit, dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan informan, serta didukung dengan pencatatan lapangan dan dokumentasi rekaman guna menjaga akurasi data. Selain itu, observasi dilakukan secara non-partisipatif dengan mengamati aktivitas pembelajaran, interaksi antara guru pamong dan peserta didik, serta kondisi sarana dan prasarana di lingkungan Sekolah Terbuka. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penyelenggaraan pendidikan sekaligus memverifikasi data hasil wawancara. Studi dokumentasi juga dilakukan melalui penelaahan dokumen kebijakan pendidikan, laporan sekolah, data peserta didik, serta regulasi yang relevan dengan penyelenggaraan Sekolah Terbuka (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan hubungan antar data. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian hingga diperoleh temuan yang konsisten dan valid, yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori kesetaraan dan hak atas pendidikan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member check dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan keakuratan data (Moleong, 2017). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga menjunjung tinggi prinsip etika penelitian, antara lain dengan memperoleh persetujuan informan sebelum wawancara, menjaga kerahasiaan identitas informan, serta menggunakan data secara bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan akademik (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sekolah Terbuka dalam Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan dan Mengurangi Disparitas Hak Pendidikan di Kota Depok

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka di Kota Depok memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan formal reguler. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, peserta didik Sekolah Terbuka umumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, memiliki kewajiban bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, atau menghadapi kondisi sosial tertentu yang menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti pola pendidikan reguler secara penuh.

Temuan ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka menjadi alternatif penting dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Dalam konteks ini, Sekolah Terbuka tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang berupaya menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi secara adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat (Tilaar, 2012; UNESCO, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Sekolah Terbuka, diperoleh informasi bahwa sebagian besar peserta didik yang mengikuti program ini sebelumnya mengalami risiko putus sekolah. Faktor ekonomi keluarga dan tuntutan pekerjaan menjadi penyebab utama mereka tidak dapat mengikuti sistem pendidikan reguler.

“Sebagian besar siswa di Sekolah Terbuka berasal dari keluarga yang ekonominya terbatas. Banyak dari mereka yang harus membantu orang tua bekerja sehingga tidak dapat mengikuti jadwal sekolah reguler secara penuh.” (Wawancara dengan pengelola Sekolah Terbuka)

Fleksibilitas waktu belajar menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan peserta didik tetap memperoleh pendidikan. Sistem pembelajaran di Sekolah Terbuka memungkinkan peserta didik mengikuti kegiatan belajar pada waktu yang lebih adaptif, sehingga mereka tetap dapat menjalankan tanggung jawab sosial maupun ekonomi.

Tabel 1 Peran Sekolah Terbuka dalam Pemerataan Pendidikan

Aspek Peran	Temuan Penelitian
Akses pendidikan	Menjangkau peserta didik yang berisiko putus sekolah
Fleksibilitas pembelajaran	Jadwal belajar disesuaikan dengan kondisi peserta didik
Kesetaraan hak pendidikan	Kurikulum dan ijazah setara dengan sekolah reguler
Dukungan sekolah induk	Sekolah induk menyediakan fasilitas dan administrasi akademik

Dari perspektif teori kesetaraan pendidikan, temuan ini menunjukkan bahwa kesetaraan tidak selalu diwujudkan melalui perlakuan yang sama bagi seluruh peserta didik, tetapi melalui pemberian layanan pendidikan yang disesuaikan

dengan kondisi individu. Rawls (1999), menyatakan bahwa keadilan sosial dapat tercapai apabila kebijakan publik memberikan perhatian yang lebih besar kepada kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Sekolah Terbuka dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan afirmatif dalam bidang pendidikan.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran di Sekolah Terbuka lebih bersifat personal dan kontekstual. Guru pamong tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami kondisi sosial peserta didik.

“Pendekatan yang digunakan berbeda dengan sekolah reguler. Kami harus memahami kondisi siswa terlebih dahulu sebelum menentukan metode pembelajaran yang tepat.” (Wawancara dengan guru pamong)

Pendekatan tersebut mencerminkan praktik pendidikan inklusif yang menekankan penghargaan terhadap keberagaman peserta didik serta penghapusan berbagai hambatan dalam proses belajar (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006). Dengan demikian, Sekolah Terbuka berperan penting dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap pendidikan formal reguler. Keberadaan program ini menjadi salah satu mekanisme yang dapat mengurangi kesenjangan pendidikan di lingkungan perkotaan.

Efektivitas Sekolah Terbuka dalam Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan

Efektivitas Sekolah Terbuka dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama, yaitu peningkatan akses pendidikan, keberlanjutan belajar peserta didik, serta pemenuhan hak pendidikan secara formal.

Tabel 2 Indikator Efektivitas Sekolah Terbuka

Indikator	Temuan Penelitian
Akses pendidikan	Peserta didik yang sebelumnya tidak bersekolah dapat kembali belajar
Keberlanjutan pendidikan	Risiko putus sekolah menurun
Pemenuhan hak pendidikan	Kurikulum dan ijazah setara dengan sekolah reguler
Partisipasi belajar	Peserta didik tetap aktif mengikuti kegiatan belajar

Hasil wawancara dengan peserta didik menunjukkan bahwa fleksibilitas sistem pembelajaran merupakan faktor yang sangat membantu mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan.

“Saya harus bekerja membantu orang tua. Kalau sekolah reguler tidak bisa ikut setiap hari. Dengan Sekolah Terbuka saya masih bisa belajar walaupun waktunya lebih fleksibel.” (Wawancara dengan peserta didik)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tetap memperoleh pendidikan meskipun mereka menghadapi keterbatasan waktu atau kondisi sosial tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Coombs (1985) yang menyatakan bahwa pendidikan alternatif memiliki peran penting dalam melengkapi keterbatasan sistem pendidikan formal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka memberikan layanan pendidikan yang setara dengan sekolah reguler. Peserta didik mengikuti kurikulum nasional yang sama, memperoleh sistem evaluasi pembelajaran yang serupa, serta mendapatkan pengakuan ijazah yang diakui secara nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka tidak hanya berfungsi sebagai alternatif teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan secara setara bagi seluruh warga negara. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara secara adil dan tanpa diskriminasi (UNESCO, 2017). Selain itu, keberhasilan Sekolah Terbuka dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan juga dipengaruhi oleh peran guru pamong dan tutor dalam mendampingi peserta didik. Pendekatan pembelajaran yang lebih komunikatif dan adaptif membantu peserta didik mengatasi kesulitan belajar serta meningkatkan motivasi belajar mereka. Temuan ini mendukung pandangan Mulyasa (2020), yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kompetensi pendidik serta lingkungan belajar yang mendukung.

Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Sekolah Terbuka

Meskipun Sekolah Terbuka memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan, penelitian ini juga menemukan berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi program tersebut.

Tabel 3 Hambatan Implementasi Sekolah Terbuka

Jenis Hambatan	Temuan Penelitian
Sarana prasarana	Fasilitas pembelajaran masih terbatas
Sumber daya manusia	Jumlah guru pamong terbatas
Dukungan kebijakan	Anggaran belum optimal
Persepsi masyarakat	Masih terdapat stigma terhadap Sekolah Terbuka

Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian Sekolah Terbuka masih bergantung pada fasilitas sekolah induk yang penggunaannya terbatas oleh jadwal sekolah reguler.

*“Fasilitas belajar masih menggunakan ruang di sekolah induk. Kadang jadwalnya harus menyesuaikan dengan kegiatan sekolah reguler.”
(Wawancara dengan pengelola sekolah)*

Selain itu, keterbatasan jumlah guru pamong juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Guru pamong sering kali harus membagi waktu antara kegiatan di sekolah reguler dan Sekolah Terbuka. Dari sisi sosial, stigma masyarakat terhadap Sekolah Terbuka juga menjadi salah satu hambatan dalam

pengembangan program ini. Sebagian masyarakat masih memandang Sekolah Terbuka sebagai pendidikan alternatif bagi peserta didik yang dianggap tidak mampu mengikuti sekolah reguler. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suyanto dan Hisyam (2018), yang menyatakan bahwa ketimpangan pendidikan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial dan struktural dalam masyarakat. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh pengelola Sekolah Terbuka untuk mengatasi tantangan tersebut. Upaya tersebut antara lain melalui penguatan koordinasi dengan sekolah induk, peningkatan kapasitas guru pamong, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya Sekolah Terbuka sebagai sarana pemenuhan hak pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan dan mengurangi disparitas hak dalam memperoleh pendidikan di Kota Depok. Meskipun demikian, optimalisasi peran tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat, peningkatan fasilitas pendidikan, serta perubahan persepsi masyarakat terhadap Sekolah Terbuka sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka di Kota Depok memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan serta mengurangi disparitas hak dalam memperoleh pendidikan, khususnya bagi peserta didik yang menghadapi hambatan sosial dan ekonomi. Melalui sistem pembelajaran yang fleksibel, pendekatan pembelajaran yang adaptif, serta pendampingan yang lebih personal oleh guru pamong, Sekolah Terbuka mampu memberikan kesempatan pendidikan bagi peserta didik yang sebelumnya berisiko putus sekolah. Keberadaan Sekolah Terbuka memungkinkan peserta didik tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa harus meninggalkan tanggung jawab sosial maupun ekonomi yang mereka hadapi. Dari perspektif kesetaraan pendidikan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesetaraan tidak selalu diwujudkan melalui perlakuan yang seragam bagi seluruh peserta didik, tetapi melalui penyediaan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Dalam konteks tersebut, Sekolah Terbuka berfungsi sebagai mekanisme afirmatif yang memberikan kesempatan belajar kepada kelompok masyarakat yang berada dalam posisi kurang beruntung. Hal ini menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka tidak hanya berperan sebagai alternatif penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pemerataan kesempatan belajar. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Sekolah Terbuka efektif dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan peserta didik secara formal. Peserta didik Sekolah Terbuka memperoleh kurikulum, sistem evaluasi pembelajaran, serta pengakuan ijazah yang setara dengan sekolah reguler. Kondisi ini menegaskan bahwa Sekolah Terbuka berfungsi sebagai salah satu mekanisme negara dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan secara adil dan tidak diskriminatif. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa optimalisasi peran Sekolah Terbuka masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran, keterbatasan sumber daya manusia khususnya guru pamong, dukungan kebijakan dan anggaran yang belum optimal, serta masih adanya stigma masyarakat terhadap Sekolah Terbuka sebagai

pendidikan alternatif bagi peserta didik yang dianggap tidak mampu mengikuti sekolah reguler. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Sekolah Terbuka dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyelenggara pendidikan, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan dan perubahan persepsi masyarakat secara lebih luas. Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa Sekolah Terbuka dapat dipahami sebagai instrumen pendidikan alternatif yang berfungsi untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan formal reguler. Dengan menyediakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan inklusif, Sekolah Terbuka berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan, mengurangi kesenjangan pendidikan, serta memperkuat prinsip keadilan sosial dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan dukungan kebijakan terhadap penyelenggaraan Sekolah Terbuka melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan kapasitas guru pamong, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peran Sekolah Terbuka sebagai bagian dari sistem pendidikan yang inklusif. Dengan dukungan yang lebih optimal dari pemerintah dan masyarakat, Sekolah Terbuka berpotensi menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan pemenuhan hak pendidikan secara berkeadilan di wilayah perkotaan.

REFERENSI

- Ainscow, M., Booth, T., & Dyson, A. (2006). *Improving schools, developing inclusion*. Routledge.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120.
- Coombs, P. H. (1985). *The world crisis in education: The view from the eighties*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Kemendikbud. (2019). *Petunjuk teknis penyelenggaraan sekolah terbuka*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen pendidikan inklusif*. Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Pudjiastuti, S. R. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Media Akademi.
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suyanto, B., & Hisyam, M. (2018). *Pendidikan dan ketimpangan sosial*. Prenadamedia Group.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebudayaan*. Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UNESCO. (2017). Education for sustainable development goals: Learning objectives. UNESCO Publishing.